

ASL

**KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM 2019
(PERBAIKAN)**



PARTAI GARUDA

**NOMOR PERKARA 242-06-32/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019**

DITERIMA DARI <u>BAWASLU</u>	
NOMOR	<u>242.06.32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</u>
HARI	: <u>KAMIS</u>
TANGGAL	: <u>11 JULI 2019</u>
JAM	: <u>09.20 WIB</u>

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 162/K.MU/PM.00.01/2019
Lampiran : 4 (empat) rangkap
Prihaal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
(Perbaikan)

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2.8. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA

**242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. (PARTAI
GARUDA)**

**2.8.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota
DPRD Provinsi**

2.8.1.2 Hasil Pengawasan Terhadap Pokok Permohonan

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan persandingan perolehan suara menurut pemohon dan termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan I (satu), sebagaimana pada pokok

yang termuat pada halaman 8 dan halaman 1, yakni sebagaimana tabel berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	12,005	12,005	
2	GERINDRA	13,500	13,300	-200
3	PDI PERJUANGAN	23,626	23,926	-300
4	GOLKAR	23,846	23,621	-225
5	NASDEM	13,354	13,354	
6	GARUDA	5,325	7,305	1,980
7	BERKARYA	7,205	7,155	-50
8	PKS	6,387	6,355	-30
9	PERINDO	9,606	9,606	
10	PPP	3,713	3,713	
11	PSI	2,095	2,095	
12	PAN	7,876	7,876	
13	HANURA	6,640	6,640	
14	DEMOKRAT	14,925	13,855	-1,070
19	PBB	8,224	8,224	
20	PKPI	1,049	946	-103
	TOTAL	159,376	159,376	

b. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon sebagaimana tabel diatas, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi di Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate, dibawah ini kami gambarkan table rekapitulasi berdasarkan formulir model DB.1-KPU.DPRD Provinsi sebagaimana tabel dibawah ini:

- 1) Daerah Pemilihan Maluku Utara I
 - a) Kabupaten Halmahera Barat

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	167
2	GERINDRA	133
3	PDI PERJUANGAN	164
4	GOLKAR	127
5	NASDEM	62
6	GARUDA	33
7	BERKARYA	72
8	PKS	49
9	PERINDO	34
10	PPP	40
11	PSI	28
12	PAN	55
13	HANURA	33
14	DEMOKRAT	89

19	PBB	38
20	PKPI	8

- Bahwa pada tanggal 1- 6 Mei 2019 KPU Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2019 yang dihadiri oleh saksi partai politik, calon anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara dan saksi calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Garuda terkait dengan perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik serta pemilih.

(PK.33.1-4)

b) Kota Ternate

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	630
2	GERINDRA	1.264
3	PDI PERJUANGAN	991
4	GOLKAR	1.005
5	NASDEM	525
6	GARUDA	340
7	BERKARYA	494

8	PKS	690
9	PERINDO	295
10	PPP	358
11	PSI	198
12	PAN	361
13	HANURA	157
14	DEMOKRAT	472
19	PBB	230
20	PKPI	62

- Bahwa pada tanggal 20 April s/d 7 Mei 2019 KPU Kota Ternate melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2019 yang dihadiri oleh saksi partai politik, calon anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara dan saksi calon Presiden dan Wakil Presiden
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Garuda terkait dengan perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik serta pemilih. **(PK.33.9-5)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.



Muksin Amrin, S.H., M.H
Ketua

Aslan Hasan, S.H., M.H
Anggota

Dr. Fahrul Abd. Muid, MA
Anggota

Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Anggota

Ikbal Ali, SP
Anggota

B. DAFTAR BUKTI

Batas

Bawaslu Kabupaten/Kota	
Halmahera Barat	
(PK.33.1-4)	Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Barat
Ternate	
(PK.33.9-5)	1 (satu) bundel: <ul style="list-style-type: none">- Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Ternate- Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kota Ternate- Formulir DB1-DPRD Provinsi di Kota Ternate- Formulir DA1-DPRD Provinsi pada 7 Kecamatan di Kota Ternate